

ANALISIS EXPORT BASE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI DATI I JAWA TIMUR PERIODE 1997-2001

Sri Rahayu¹

Daryono Soebagiyo¹

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The growth of many economic sectors can support mutually. Therefore, it needs to analyze the sectors which have potency to be basis sector and non-basis sectors. Some activities of economic sector in an area is basic, it is means that its growth rises and determines development of the area entirely, while activities of non-basic economic sector is consequence of the development entirely. More further, to make clearer the identification to the activity of economic sector, it needs to analyze the large of multiplier of the basis sector activity to the region income and the leaking level of region income which occurred as result of basis sector activity.

The research area is East Java province, and object of PRDB research sectorally in East Java province in 1997-2001 and PDB Indonesia is as references. This research is explorative. To analyze the basis sector is used LQ method.

Keywords: *export base, location quotient, multiplier, economic sector*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan gejala ke arah perbaikan sungguhpun gejala tersebut belum sebesar yang diharapkan. haruslah dipahami bahwa membenahi perekonomian yang sempat terpuruk akibat dari krisis ekonomi membutuhkan ketekunan, kesabaran dan perjuangan tidak ringan. Gejala ke arah perbaikan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2001 semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,44% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 3,98% (Statistik Indonesia, 2001: 519).

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengemukakan kewena-

ngan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerahnya semakin luas. Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun program dan rencana daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Selain itu juga membawa konsekuensi berkurangnya sumber penerimaan dominan masing-masing pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, maka harus benar-benar diperhatikan sektor mana yang menjadi sektor basis sehingga dapat menyumbang dalam peningkatan pendapatan daerah.

Propinsi Jawa Timur adalah satu-satunya propinsi terbesar di Pulau Jawa bagian timur. Usaha pemulihan ekonomi pasca krisis nampaknya belum banyak membawa hasil, terbukti tahun 2000 hanya tumbuh sebesar

3,25%, sementara tahun 2001 hanya sebesar 3,34%. Dengan melihat pertumbuhan di dua tahun tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan di Jawa Timur perlahan-lahan mulai menampakkan peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

perdagangan, sektor hotel dan restoran, serta sektor Pertanian (BPS Propinsi Jawa Timur, 2001: 440).

Berdasarkan latar belakang di atas, tentang pentingnya peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur, maka yang menjadi pokok

Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 2001 (dalam %)

Sektor/sub sektor	Tahun 2001
1. Pertanian	2,42
2. Pertambangan dan penggalian	-0,16
3. Industri pengolahan	1,18
4. Listrik dan air bersih	7
5. Kontruksi	0,01
6. Perdagangan, hotel dan restoran	7
7. Pengangkutan dan komunikasi	0,99
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,8
9. Jasa-jasa	3,6

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur tahun 2001 didukung oleh sub sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7%, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami kenaikan sebesar 5,8%, sektor jasa-jasa mengalami kenaikan 3,6%, sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 2,42%, sektor industri pengolahan sebesar 1,18%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,99%, sedangkan sektor konstruksi sebesar 0,01%. Sementara satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan negatif 0,16%.

Sungguhpun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penyebabnya adalah sektor-sektor yang mengalami andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan relatif kecil, yaitu sektor industri pengolahan, sektor

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang relatif berpotensi dan dapat berperan menjadi sektor basis untuk menunjang pembangunan di Propinsi Jawa Timur
2. Berapa besar multiplier dari kegiatan sektor basis tersebut terhadap pendapatan daerah di Propinsi Jawa Timur
3. Berapa besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan sektor basis

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sektor-sektor yang relatif berpotensi dan dapat berperan menjadi sektor basis.
2. Untuk menganalisis berapa besar multiplier dari kegiatan sektor basis tersebut terhadap pendapatan daerah Propinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan sektor basis

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah propinsi Jawa Timur, dengan obyek penelitian: PDRB secara sektoral di propinsi Jawa Timur tahun 1997–2001.

Dalam penelitian ini dilihat juga PDB Indonesia untuk digunakan sebagai daerah referensi dan selanjutnya dapat dianalisis sektor-sektor yang patut dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi rentang pengamatan dari tahun 1997–2001. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

• Variabel Penelitian

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993 dari tahun 1997–2001 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1993 dari tahun 1997–2001 yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

• Definisi Operasional Variabel

- a. PDB pada tingkat nasional atau PDRB pada tingkat regional (propinsi, kabupaten, kota) adalah menggambarkan kemampuan wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu.
- b. Perhitungan PDB dan PDRB dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi ini adalah dengan cara menjumlahkan

nilai produksi yang diciptakan oleh masing-masing sektor produktif yang ada dalam perekonomian.

- c. Klasifikasi sektor dalam penyajian PDB dan PDRB dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup Pertanian dan penggalian; Industri pengolahan; Listrik, bangunan dan air bersih; Perdagangan, hotel dan restoran; Transportasi dan komunikasi, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta Jasa-jasa.
- d. Penggunaan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan alasan supaya dapat memberikan gambaran tentang produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah.

• Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat eksploratif. Untuk menganalisis sektor basis digunakan metode LQ (*Location Quotient*) sebagai berikut (Soepono, 2001: 44):

$$LQ = \frac{E_{ij} / E_j}{E_{in} / E_n}$$

Keterangan:

LQ : Koefisien *Location Quotient*

E_{ij} : Variabel regional disektor i di wilayah j

E_j : Variabel regional di wilayah j

E_{in} : Variabel regional di sektor i di wilayah nasional

E_n : Variabel regional di perekonomian nasional

Apabila LQ = 1 berarti semua permintaan akan *output* suatu sektor dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah maupun di daerah himpunan. Apabila LQ > 1 berarti suatu sektor i mampu melakukan ekspor sehingga disebut sektor *basic*. Apabila LQ < 1 berarti daerah itu

kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu apabila pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan, maka sektor ini disebut sektor *non basic*.

Untuk mencari nilai *multiplier* dapat menggunakan perhitungan *multiplier export base*, dengan formulasi sebagai berikut:

$$K = \frac{1}{1-a}$$

dimana: $a = S/T$

Keterangan:

K : multiplier

a : nilai perbandingan antara kegiatan sektor non basis dengan kegiatan ekonomi total

S : sektor non basis

T : sektor ekonomi total

Sedangkan untuk mengetahui kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari sektor basis, menggunakan perhitungan sebagai berikut (Arsyad, 1999: 144):

$$L = 100 - [(1 - LQ / 100)]$$

Keterangan:

L : besarnya kebocoran

LQ : koefisien Location Quotient

100 : konstanta

LANDASAN TEORI

• Pertumbuhan Ekonomi Daerah Model Basis

Konsep basis ekonomi bermula dari kebutuhan untuk memprediksikan pengaruh aktivitas ekonomi baru di kota dan di daerah.

Model basis ekonomi dibuat untuk mengidentifikasi atau menargetkan sektor di daerah. Menurut *Ghali* (1997) dalam model basis ekonomi penentu satu-satunya pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Sektor daerah yang bersifat basis menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sektor basis adalah semua sektor lokal yang menjual kelebihan produknya dan melayani konsumen di luar daerah lokal. Model basis ekonomi atau model permintaan adalah pengembangan dari bentuk produk daerah yang dikembangkan oleh *John Maynard Keynes*, dengan formula sebagai berikut:

$$Y = I + C + G + (x-m)$$

Keterangan:

Y = Produk regional

C = Konsumsi

x = Ekspor

m = Impor

Rumus di atas merupakan pertumbuhan ekonomi dan produk regional sebagai interaksi antara faktor penawaran dan faktor permintaan. Persamaan permintaan menunjukkan produk regional (Y) dan ekspor (x) dan non ekspor (m).

Menurut model basis ekonomi, pertumbuhan suatu daerah tergantung pada pertumbuhan ekspornya dan kenaikan permintaan yang bersifat ekstern bagi daerah yang bersangkutan merupakan penentu pokok dari pertumbuhan regional. Bertambah luasnya basis ekspor akan cenderung menaikkan tingkat pertumbuhan. Sebagai akibatnya daerah-daerah yang tumbuh paling cepat akan cenderung mengalami surplus ekspor. Jika daerah-daerah mempunyai kelebihan kapasitas maka perluasan basis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ibid: 38-39).

Model basis ekonomi agak berbeda dengan model tipe *Keyness*. Yang dijelaskan

dalam model basis ekonomi adalah perubahan pendapatan regional. Fungsi tabungan dalam menciptakan kebocoran dianggap sebagai impor, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Sedangkan fungsi investasi diasumsikan sebagai ekspor yang merupakan pendorong dari perekonomian yang berbasis ekonomi (ekspor).

• Teori Basis Ekspor (*Export Base Theory*)

Menurut Hoover (1984), teori pertumbuhan berbasis ekspor atau berbasis ekonomi menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas *non basic* merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Sedangkan menurut Bendavid-Val (1991), semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non basic* mencakup aktivitas-aktivitas pendukung seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi untuk pasar lokal dan produksi input untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*.

Blair (1991) dan Hoover (1984) juga menyatakan teori pertumbuhan berbasis ekspor atau berbasis ekonomi tertanam dalam gagasan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran yang masuk agar tumbuh dan satu-satunya cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor.

Tiebot (1962) menggambarkan pentingnya ekspor sebagai berikut: pasar ekspor dipandang sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Bila kesempatan kerja yang melayani pasar ini naik turun, kesempatan kerja yang melayani pasar lokal juga naik turun. Bila pabrik (ekspor) tutup, pedagang eceran (lokal) merasakan dampaknya karena para pekerja pabrik yang diberhentikan tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, karena peranan penggerak

utama itu, kesempatan kerja ekspor dipandang sebagai “dasar” (*basic* atau basis). Kesempatan kerja yang melayani pasar lokal dipandang menyesuaikan atau adaptif dan diberi istilah “non dasar” (*non-basic*).

Teori berbasis ekspor atau teori basis ekonomi itu dapat dinyatakan menurut pendapatan atau kesempatan kerja:

$$\Delta T = k \Delta B$$

$$\Delta Y = k \Delta X$$

dimana:

T = Total kesempatan kerja

K = Pengganda berbasis ekspor atau pengganda basis ekonomi

B = Kesempatan kerja *basic*

Y = Total pendapatan

X = Penghasilan ekspor

Pendapatan yang semula diterima oleh sektor ekspor dibelanjakan dan dibelanjakan lagi di daerah setempat, sehingga menciptakan tambahan pendapatan melalui pengganda. Karyawan-karyawan yang menciptakan perekonomian lokal, pada gilirannya membelanjakan penghasilan mereka secara lokal, hingga menciptakan pekerjaan-pekerjaan tambahan. Besarnya angka pengganda bergantung pada kesediaan individu-individu untuk membelanjakan uang mereka di perekonomian lokal daripada membelanjakan di luar daerah setempat.

Yang dibutuhkan dalam memperkirakan perubahan komunitas adalah dengan cara merencanakan pengembangan rasio *economic base* (T/B untuk rasio rata-rata dan $\Delta T/\Delta B$ untuk rasio marjinal), dimana menunjukkan Total (T) dan *Basic* (B) pendapatan atau tenaga kerja.

Hildebrand dan Mace (1959), telah mengembangkan model *export base*, yang sama dengan pengamatan makro ekonominya

Keynessian. Dimana penggandaan hasil ($1/(1-PC_L)$). PC_L melambangkan kapasitas rata-rata terhadap penggunaan hasil produksi lokal (APC_L) atau propensitas marjinal (MPC_L)

Jika kita dapat menentukan nilai total variabel *basic* dan *non basic* diakhir periode setiap tahun, kita dapat menghitung *multiplier marginal export base* dengan mengurangi nilai dari total *basic*.

Menurut *Isard* (1990), tenaga kerja atau pendapatan *basic* atau *non basic* sesuai dengan jumlah atau pertumbuhan tingkat pendapatan baik *basic* ataupun *non basic* yang dibagi jumlah atau pertumbuhan tenaga kerja atau pendapatan *basic*.

Multiplier dapat hitung dengan persamaan berikut :

$$T = B + N$$

$$B = T - N$$

$$\frac{B}{T} = \frac{T - N}{T}$$

$$\frac{B}{T} = 1 - \frac{N}{T}$$

$$B = T \left(1 - \frac{N}{T} \right)$$

$$T = B \left(\frac{1}{1 - \frac{N}{T}} \right)$$

$$M = \frac{T}{B}$$

dimana:

- T = Total tenaga kerja (pendapatan)
- B = Tenaga kerja (pendapatan) *basic*
- N = Tenaga kerja (pendapatan) *non basic*
- M = Multiplier

Multiplier adalah sebuah rasio dimana jumlahnya tidak tentu, sedangkan pengaruh *multiplier* mengacu pada jumlah pekerjaan (suatu pendapatan) atau yang didukung oleh pekerjaan (pendapatan) *basic*. Hal ini untuk mengidentifikasi pengaruh *multiplier* dari persamaan di atas. Kita perlu mencontohkan pekerjaan (pendapatan) *basic* dengan *multiplier* dan kemudian mengurangi tenaga kerja (pendapatan) *basic* tersebut.

Jasa adalah suatu jenis *output* ekonomi. Dalam kepustakaan teori basis ekspor, "kegiatan jasa lokal" mengacu kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang melayani penduduk setempat. Kegiatan jasa dapat merupakan suatu sumber penghasilan ekspor dan bagian dari kegiatan-kegiatan dasar wilayah. Jasa dapat diekspor dari wilayah ketika penduduk lokal melakukan perjalanan keluar wilayah untuk memberi jasa-jasa atau ketika penduduk dari suatu wilayah melakukan perjalanan dari luar wilayah untuk membeli jasa-jasa. Bila penjualan oleh sektor jasa lokal membawa Rupiah dari luar ke perekonomian lokal, maka hal itu merupakan basis dan seharusnya dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (Soepono, 2001:41-43).

Walaupun model basis ekspor atau basis ekonomi memiliki kelebihan tetapi masih ada beberapa kritik untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang salah tentang studi-studi lain dan untuk memahami batas-batas pendekatan ini. Kritik-kritik terhadap teori basis antara lain sebagai berikut:

a. Keutamaan ekspor

Menurut *Ghali* (1977) dan *Sirkin* (1959), teori basis ekonomi menekankan ekspor sebagai satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi padahal penentu pertumbuhan banyak seperti peningkatan investasi dari luar daerah atau dengan mengganti produk-produk dan jasa-jasa yang semula diimpor dengan produksi dalam negeri.

b. Substitusi impor

Substitusi impor merupakan suatu alternatif strategi pembangunan yang masyarakat gunakan untuk mendorong pertumbuhan tanpa menambah ekspor. Dari pada menambah ekspor, lebih baik menghasilkan di daerah setempat apa yang semula diimpor. Strategi demikian akan mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang lebih kecil tiap rupiah yang masuk ke dalam aliran uang berputar akan menciptakan pendapatan lebih banyak.

c. Produktivitas

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sumber daya lain juga dapat menaikkan tingkat pendapatan tanpa menaikkan tingkat ekspor. Kenaikan produktivitas dapat pula menambah ekspor bila perbaikan produktivitas itu berada di sektor ekspor.

Walaupun ada beberapa kritik terhadap pertumbuhan ekonomi model basis ekspor (ekonomi), tetapi model ini tetap salah satu teori prinsipil yang melandasi kebijakan dalam pembangunan dan perencanaan perkotaan (Soepono, 2001: 48).

- Teknik Menentukan dan Mengukur Suatu Basis

Salah satu langkah menjalankan studi basis ekonomi adalah memilih dan menentukan satuan ukuran. Setelah memilih ukuran kemudian memilih suatu teknik tertentu untuk menentukan apakah suatu kegiatan *basic* atau tidak. Dalam hal ini dapat menggunakan pendekatan tidak langsung yaitu pendekatan LQ (*Location Quotient*) dan pendekatan persyaratan minimum (Soepono, 2001: 44).

1. Pendekatan *Location Quotient*

Berdasarkan penggunaan komponen dari jumlah produk daerah, ekonomi regional dibagi menjadi dua sektor. *Pertama*, sektor basis dimana faktor ekonomi tergantung pada

pasar di luar daerah dan yang *kedua*, sektor pasar yang tergantung pada pasar domestik.

Hasil bagi ini merupakan metode yang menarik untuk menaksir pendapatan atau kesempatan kerja *basic*/ekspor. Suatu *Location Quotient* diberi batasan sebagai suatu rasio sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

dimana :

E_{ij} = Variabel *regional* (pendapatan *regional*, *employment* dan sebagainya) di sektor i di wilayah j

E_j = Variabel *regional* di wilayah j

E_{in} = Variabel *regional* di sektor i di perekonomian nasional

E_n = Variabel *regional* di perekonomian *regional*

Umumnya, perekonomian acuan berupa negara yang paling mendekati perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan mengambil asumsi bahwa perekonomian yang *self-sufficient*. *Location Quotient* yang lebih besar dari satu berarti bahwa perekonomian daerah memiliki kesempatan kerja lebih dari cukup di sektor i untuk menyediakan daerah itu dengan produknya, dengan kata lain sektor i merupakan sektor *basic*. Bila bagi hasil lokasi itu kurang dari satu, berarti daerah itu kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu bila konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan. Jika kondisinya demikian maka sektor i adalah sektor *non basic*

DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Secara umum Propinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur

daratan dengan proporsi lebih luas dan kepulauan Madura. Luas daerah Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan adalah 46.712,80 km² dimana luas kawasan daratan sekitar 89,8 persen dari seluruh luas Propinsi Jawa Timur dan sisanya adalah wilayah Kepulauan Madura.

Luas wilayah Propinsi Jawa Timur yang mencapai 46.712,80 km² habis terbagi dalam 37 pemerintahan tingkat II atau kabupaten/kotamadya yaitu 29 kabupaten dan 9 kotamadya, 640 kecamatan dan 8.464 desa/kelurahan.

Kabupaten Malang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 33 kecamatan, sedangkan daerah yang mempunyai desa/kelurahan terbanyak adalah kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Sementara itu daerah dengan luas wilayah paling besar adalah Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah sebesar 5.783 km².

Jumlah pencari kerja pada tahun 2000 sebanyak 317.274 orang, naik menjadi 320.269 orang pada tahun 2001. Sedangkan jumlah lowongan yang tersedia hanya untuk 88.329 orang. Dengan demikian masih terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja.

Penempatan kerja di Propinsi Jawa Timur tahun 2001 hanya mencapai 18,45 persen dari jumlah pencari kerja. Penghapusan pencari kerja adalah sebesar 12 persen dan sisanya yang belum ditempatkan sebesar 69 persen. Sedangkan jumlah permintaan yang dipenuhi hampir mencapai 67 persen dari lowongan adalah 19 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

• Keadaan Perekonomian

Dengan melihat PDRB, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2001 didukung oleh sub sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas, dan air bersih,

Tabel 2. Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Kerja dan Permintaan Kerja Tahun 1997-2001

Uraian	2000	2001
Pencari kerja	317.274	320.269
Penempatan	57.425	59.100
Penghapusan	63.450	39.550
Belum ditempatkan	196.399	221.619
Permintaan, lowongan	89.341	88.329
Dipenuhi	57.425	59.100
Penghapusan lowongan	15.767	16.654
Sisa lowongan	16.149	12.695

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

• Keadaan Penduduk

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2001, jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur di tahun 2001 adalah 34.285.524 jiwa. Dibanding tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,8 persen. Pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 1997-2001 adalah 0,7 persen pertahun.

masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 7,80 persen dan 7,49 persen; diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami kenaikan sebesar 5,8 persen; sektor jasa-jasa mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen, sektor pertanian sebesar 2,42 persen, sektor industri pengolahan sebesar 1,18 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhan sebesar 0,99 persen

sedangkan sektor konstruksi sebesar 0,01 persen. Sedangkan satu-satunya sektor yang mengalami konstruksi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan negatif sebesar 0,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan

dilakukan Propinsi Jawa Timur mulai menampakkan peningkatan.

Pertumbuhan masing-masing sektor di Propinsi Jawa Timur tahun 1997-2001 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 1997-2001

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	1,04	-5,02	2,19	0,69	2,42
Pertambangan dan Penggalian	-10,88	-42,69	63,51	38,72	-0,16
Industri pengolahan	9,67	-22,20	-0,05	1,73	1,18
Listrik, gas dan air bersih	0,28	3,16	13,00	11,31	7,49
Bangunan	3,09	-33,22	-9,91	0,80	0,01
Perdagangan, hotel dan restoran	6,43	-17,79	0,30	4,43	7,80
Pengangkutan dan komunikasi	1,71	-4,37	9,65	6,83	0,99
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	4,17	-20,48	-6,33	3,43	5,79
Jasa-jasa	2,87	5,32	0,86	1,70	3,26
Total	5,02	-16,12	1,21	3,26	3,34

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

penyebabnya adalah sektor sektor yang mempunyai andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan yang relatif kecil, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran dan sektor pertanian.

Semenjak terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 1998 yaitu sebesar 16,12 persen akibat dari krisis moneter, usaha pemulihan ekonomi di Propinsi Jawa Timur nampaknya belum banyak membawa hasil, terbukti pertumbuhan ekonomi di tahun 1999 hanya sebesar 1,21 persen di tahun 2000 hanya sebesar 3,26 persen, sementara di tahun 2001 hanya sebesar 3,34 persen. Dengan melihat pertumbuhan dua tahun terakhir bisa disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi yang

ANALISIS DATA

Penelitian yang telah dilakukan pada daerah Propinsi Jawa Timur ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan tiap sektor dan pertumbuhan PDRB yang terjadi di Propinsi Jawa Timur, besarnya *multiplier*, serta besarnya kebocoran pendapatan daerah, sehingga dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang bisa dikembangkan dalam jangka waktu tertentu untuk kemajuan dan peningkatan pendapatan daerah di Propinsi Jawa Timur.

1. Analisis untuk menentukan sektor-sektor basis di Jawa Timur

Peranan tiap sektor dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian

daerah. Demikian juga peran sektoral yang terdapat di Propinsi Jawa Timur dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan *Location Quotient* (LQ), sehingga dapat ditentukan sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Propinsi ini. Penghitungan LQ tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Formulasi : } LQ_i = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan:

LQ : Koefisien *Location Quotient*
(perbandingan antara produk sektor daerah dengan produk nasional)

E_{ij} : PDRB sektor i di Propinsi Jawa Timur

E_j : Total PDRB Jawa Timur

E_{in} : PDB sektor i di Indonesia

E_n : Total PDB

Sebagai contoh untuk menghitung LQ, kita ambil sektor pertanian tahun 1997 yaitu ;
Diketahui:

$$E_{ij} = 10.360.819,63$$

$$E_j = 64.853.575,87$$

$$E_{in} = 64.468$$

$$E_n = 433.246$$

$$\text{Jadi LQ} = \frac{10.360.819,63 / 64.853.575,87}{64.468 / 433.246}$$

$$LQ = \frac{0,1598}{0,1488}$$

$$LQ = 1,074$$

Kemudian dengan metode penghitungan yang sama, diulang pada semua sektor dari tahun 1998-2001.

2. Analisis untuk menentukan *multiplier* dari kegiatan sektor basis terhadap pendapatan

Untuk mengetahui perubahan atau peningkatan sektor basis, sektor non basis dan perubahan terhadap sektor ekonomi total maka harus dilakukan penghitungan *Multiplier Export Base*, sebagai berikut :

$$\text{Formulasi : } K = \frac{1}{1-a}$$

$$\text{dimana : } a = \frac{S}{T}$$

Keterangan :

K = *Multiplier*

a = Nilai perbandingan antara kegiatan sektor non basis dengan kegiatan ekonomi total

S = Sektor non basis

T = Sektor ekonomi total

Sebagai contoh untuk menghitung *multiplier*, kita ambil Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1997, sebagai berikut:

Pada tahun 1997 sektor basis ada lima yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis berarti ada empat sektor yaitu :

1. Sektor pertambangan dan pengalihan dengan PDRB sebesar 875.522,36.
2. Sektor bangunan dengan PDRB sebesar 4.370.532,83.
3. Sektor pengangkutan dan komunikasi dengan PDRB sektor 4.236.276,08.
4. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan PDRB sebesar 4.145.932,45.

Kemudian PDRB dari keempat sektor non basis tersebut dijumlahkan dan diberi simbol S, seperti berikut :

$$\begin{aligned} S &= 875.522,36 + 4.370.532,83 + \\ &\quad 4.236.276,08 + 4.145.932,45 \\ &= 13.628.263,72 \end{aligned}$$

Selanjutnya kita lihat total PDRB Propinsi Jawa Timur tahun 1997 dan diberi simbol T, seperti berikut :

$$T = 64.853.575,87$$

Maka :

$$\begin{aligned} a = \frac{S}{T} &= \frac{13.628.263,72}{64.853.575,87} \\ &= 0,210 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K = \frac{1}{1-a} &= \frac{1}{1-0,210} \\ &= \frac{1}{0,79} \\ &= 1,266 \end{aligned}$$

Dengan metode penghitungan yang sama, maka dapat dihitung *Multiplier Export Base* pada tahun 1998-2001.

3. Analisis untuk menentukan kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan sektor basis

Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang masih berada di Propinsi Jawa Timur dan pendapatan yang berada di luar propinsi serta rata-rata kebocoran pertahun maka harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Formulasi : } L = 100 - [(1 - LQ/100) * 100]$$

Keterangan :

- L = Besarnya kebocoran
- LQ = Koefisien *Location Quotient*
- 100 = Konstanta

Langkah pertama yang perlu diketahui adalah sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis ekspor. Setelah itu baru dapat menghitung berapa besar kebocoran pendapatan akibat dari kegiatan sektor ekonomi basis.

Sebagai contoh dalam penghitungan ini adalah sektor pertanian tahun 1997, sebagai berikut:

$$LQ = 1,074$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } L &= 100 - [(1 - 1,074/100) * 100] \\ &= 100 - 98,93 \\ &= 1,07 \end{aligned}$$

Dengan metode penghitungan yang sama maka dapat diketahui tingkat kebocoran pada sektor-sektor ekonomi di Propinsi Jawa Timur tahun 1998-2001.

Setelah diketahui kebocoran masing-masing sektor, maka dapat dihitung rata-rata kebocoran pendapatan per tahun dengan cara menjumlahkan persentase kebocoran pendapatan sektor basis dalam tahun tertentu kemudian dibagi dengan jumlah sektor yang menjadi sektor basis tersebut.

Sebagai contoh dalam penghitungan ini adalah untuk tahun 1997. Kebocoran pendapatan sektor basis di tahun 1997 terdiri dari lima sektor yaitu:

- 1) Sektor pertanian sebesar 1,07
- 2) Sektor industri pengolahan sebesar 1,21
- 3) Sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,39
- 4) Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,26
- 5) Sektor jasa-jasa sebesar 1,14

Kemudian kelima sektor tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 6,07 selanjutnya di bagi 5, yaitu jumlah sektor basis tahun 1997, maka diperoleh rata-rata kebocoran pendapatan di tahun 1997 adalah 1,21

Dengan metode penghitungan yang sama maka dapat diketahui tingkat rata-rata kebocoran pada sektor-sektor ekonomi di Propinsi Jawa Timur tahun 1998-2001.

PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Sektor Basis

Dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Jawa Timur dan data Produk Domestik Bruto Indonesia sebagai daerah acuannya, dapatlah dihitung *Location Quotient* untuk menentukan apakah suatu sektor ekonomi basis (*basic*) atau bukan.

Dalam tahun 1997 diantara sembilan sektor di Propinsi Jawa Timur, terdapat lima sektor yang merupakan sektor basis. Nilai LQ yang tertinggi ditempati oleh sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 1,394. Sektor kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 1,256. Sektor ketiga yaitu sektor industri pengolahan sebesar 1,205. Sektor keempat yaitu sektor jasa-jasa sebesar

1,142. Sedangkan sektor kelima yaitu sektor pertanian, sebesar 1,074.

Kemudian empat tahun kemudian yaitu tahun 2001, juga terdapat lima sektor yang merupakan sektor basis. Nilai tertinggi masih ditempati oleh sektor listrik gas dan air bersih sebesar 1,578. Selama periode 1997-2001, sektor tersebut mengalami peningkatan yang cukup bagus dibanding dengan sektor-sektor yang lainnya.

Urutan kedua juga masih tetap sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,345. Urutan ketiga adalah sektor jasa-jasa sebesar 1,173. Sedangkan sektor pertanian yang pada tahun 1997 menempati urutan terakhir meningkat pada tahun 2001, menempati urutan keempat yaitu sebesar 1,087. Dan urutan yang kelima adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,076. Walaupun sektor ini menempati urutan yang terakhir, tetapi sektor ini mengalami peningkatan yang cukup bagus, karena pada tahun 1997 sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor non basis.

Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah sektor industri pengolahan karena sektor ini yang semula pada tahun 1997-2000 merupakan sektor basis, pada tahun 2001 berubah menjadi sektor non basis.

Tabel 4. Koefisien *Location Quotient* Propinsi Jawa Timur Terhadap Indonesia Periode 1997-2001

No	Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	1,074*	1,070*	1,066*	1,068*	1,087*
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,152	0,093	0,153	0,204	0,205
3.	Industri pengolahan	1,205*	1,096*	1,050*	1,022*	0,996
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,394*	1,445*	1,502*	1,576*	1,578*
5.	Bangunan	0,826	0,899	0,822	0,783	0,753
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	1,256*	1,308*	1,307*	1,310*	1,345*
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0,890	1,039*	1,143*	1,140*	1,076*
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,719	0,807	0,811	0,813	0,834
9.	Jasa-jasa	1,142*	1,164*	1,147*	1,183*	1,173*

Keterangan : * Sektor basis

Sumber : Data diolah dari PDRB Propinsi Jawa Timur dan PDB Indonesia

Tabel 4 menunjukkan Koefisien *Location Quotient* Propinsi Jawa Timur terhadap Indonesia periode 1997-2001.

2. Hasil Analisis Menentukan Besarnya Multiplier dari Kegiatan Sektor Basis Terhadap Pendapatan Daerah di Propinsi Jawa Timur

Dilakukannya penghitungan besarnya *multiplier* dari kegiatan sektor basis adalah untuk menganalisis seberapa besar perubahan atau peningkatan kegiatan sektor basis, sektor non basis maupun perubahan terhadap sektor ekonomi total di Propinsi Jawa Timur periode 1997-2001.

Pada periode 1997-2001, perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi sektor basis di Propinsi Jawa Timur sebesar 1 (satu). Perubahan kegiatan sektor basis sebesar 1 tersebut menyebabkan perubahan atau peningkatan sektor non basis pada tahun 1997 sebesar 0,266; tahun 1998 sebesar 0,140; tahun 1999 sebesar 0,135; tahun 2000 sebesar 0,139 dan tahun 2001 sebesar 0,629.

Sedangkan perubahan ekonomi total di Propinsi Jawa Timur pada periode 1997-2001 adalah sebesar *multiplier*nya. Pada tahun 1997 sebesar 1,266; tahun 1998 sebesar 1,140; tahun 1999 sebesar 1,135; tahun 2000 sebesar 1,139 dan tahun 2001 sebesar 1,629. Tabel 5. menunjukkan besarnya perubahan sektor ekonomi total sebesar *multiplier*, perubahan

kegiatan sektor basis dan perubahan sektor non basis Propinsi Jawa Timur periode 1997-2001.

3. Hasil Analisis Kebocoran Daerah sebagai Akibat dari Sektor Basis di Propinsi Jawa Timur Periode 1997-2001

Dengan diberlakukannya perhitungan terhadap kebocoran pendapatan maka akan dapat diketahui besarnya pendapatan sektor yang masih berada di Propinsi Jawa Timur dan yang berada di daerah lain (di luar Propinsi Jawa Timur) serta juga dapat diketahui rata-rata kebocoran pendapatan pertahun.

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, kebocoran pendapatan yang tertinggi di Propinsi Jawa Timur pada periode 1997-2001 didominasi oleh sektor listrik, gas dan air bersih. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 1997-2001 sektor ini mampu menempati urutan tertinggi dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Besarnya kebocoran pada tahun 1997 adalah 1,39; tahun 1998 sebesar 1,44; tahun 1999 sebesar 1,50; tahun 1999 sebesar 1,58 dan pada tahun 2001 sebesar 1,58.

Sedangkan apabila dilihat pada tahun 2001, kebocoran tertinggi adalah tetap pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,58; kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,34; disusul sektor jasa-jasa sebesar 1,17. Urutan selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 1,09 dan yang terakhir adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,08.

Tabel 5. Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis dan Perubahan Sektor Non Basis Propinsi Jawa Timur Periode 1997-2001 (dalam persen)

Tahun	Multiplier	Δ sektor basis	Δ sektor non basis
1997	1,266	1	0,266
1998	1,140	1	0,140
1999	1,135	1	0,135
2000	1,139	1	0,139
2001	1,629	1	0,629

Sumber : Data diolah dari PDRB Propinsi Jawa Timur dan PDB Indonesia

Besarnya tingkat kebocoran tersebut menunjukkan bahwa selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor tertentu di Propinsi Jawa Timur juga mampu diekspor ke daerah lain (luar Propinsi Jawa Timur). Tabel 6 menunjukkan besarnya persentase kebocoran pendapatan di Propinsi Jawa Timur.

Setelah mengetahui besarnya kebocoran pendapatan di Propinsi Jawa Timur maka dapat diketahui pula besarnya pendapatan yang tetap berada di Propinsi Jawa Timur. Pendapatan ini menggambarkan besarnya kemampuan sektor-sektor basis yang ada di Propinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan di daerahnya sendiri.

Selama priode 1997-2001, persentase tertinggi pendapatan yang tetap berada di Propinsi Jawa Timur adalah pada tahun 2000 sebesar 98,98, yaitu sektor industri

pengolahan. Urutan kedua adalah tahun 1998 dengan persentase sebesar 98,96 pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Urutan ketiga adalah tahun 1999 sebesar 98,95 pada sektor industri pengolahan. Urutan keempat tahun 1997 sektor pertanian sebesar 98,93 dan urutan kelima tahun 2001 sebesar 98,92 pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Tabel 7 menunjukkan tingkat persentase pendapatan yang tetap berada di Propinsi Jawa Timur periode 1997-2001.

Setelah diketahui kebocoran pendapatan yang diakibatkan oleh kegiatan sektor basis maka dapat kita ketahui rata-rata kebocoran pendapatan pertahun dan rata-rata pendapatan yang tetap berada di Propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8

Pada tahun 2001, Propinsi Jawa Timur mengalami rata-rata kebocoran pendapatan terbesar selama periode 1997-2001, yaitu

Tabel 6. Persentase Kebocoran Pendapatan di Propinsi Jawa Timur Periode 1997-2001 (dalam persen)

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	1,07	1,07	1,07	1,07	1,09
2. Industri pengolahan	1,20	1,10	1,05	1,02	-
3. Listrik, gas dan air bersih	1,39	1,44	1,50	1,58	1,58
4. Perdagangan, hotel dan restoran	1,26	1,31	1,31	1,31	1,34
5. Pengangkutan dan komunikasi	-	1,04	1,14	1,14	1,08
6. Jasa-jasa	1,14	1,16	1,15	1,18	1,17

Sumber : Diolah dari data PDRB Propinsi Jawa Timur dan PDB Indonesia

Tabel 7. Persentase Pendapatan yang Tetap Berada di Propinsi Jawa Timur Periode 1997-2001 (dalam persen)

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	98,93	98,93	98,93	98,93	98,91
2. Industri pengolahan	98,80	98,90	98,95	98,98	-
3. Listrik, gas dan air bersih	98,61	98,56	98,50	98,42	98,42
4. Perdagangan, hotel dan restoran	98,74	98,69	98,70	98,69	98,66
5. Pengangkutan dan komunikasi	-	98,96	98,86	98,86	98,92
6. Jasa-jasa	98,86	98,84	98,85	98,82	98,83

Sumber : Data diolah dari PDRB Propinsi Jawa Timur dan PDB Indonesia

Tabel 8. Persentase Rata-rata Kebocoran Pendapatan dan Rata-rata Pendapatan yang Tetap Berada di Propinsi Jawa Timur Periode 1997-2001 (dalam persen)

Tahun	Rata-rata kebocoran pendapatan	Pendapatan yang tetap berada di Jawa Timur
1997	1,21	98,79
1998	1,19	98,81
1999	1,20	98,80
2000	1,22	98,78
2001	1,25	98,75

Sumber : Data diolah dari PDRB Propinsi Jawa Timur dan PDB Indonesia

sebesar 1,25 persen, yang berarti 98,75 persen dari kebocoran pendapatan sektor basis tetap berada di Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2001 kemampuan ekspor Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dari angka PDRB atas dasar harga konstan 1993 selama periode 1997-2001 dapat diketahui sektor basis di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Location Quotien* (LQ). Sektor-sektor di Propinsi Jawa Timur yang dapat bersaing di Indonesia berdasarkan *Koefisien Location Quotient* (LQ) adalah:
 - Sektor listrik, gas dan air bersih.
 - Sektor perdagangan, hotel dan restoran.
 - Sektor jasa-jasa.
 - Sektor pertanian.
 - Sektor pengangkutan dan komunikasi.
2. Selama periode 1997-2001, besarnya perubahan atau peningkatan kegiatan sektor basis adalah tetap yaitu 1 (satu). Sedangkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi non basis masih mengalami fluktuasi. Akan tetapi perubahan kegiatan
3. Besarnya tingkat kebocoran pendapatan menunjukkan besarnya kemampuan Propinsi Jawa Timur untuk mengekspor produknya ke daerah lain (diluar Propinsi Jatim). Semakin tinggi persentase kebocoran pendapatan menunjukkan semakin besar produk yang diekspor ke luar daerah setelah mampu memenuhi kebutuhan di Propinsi Jawa Timur itu sendiri. Kemampuan Propinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan di daerahnya ditunjukkan oleh persentase tingkat pendapatan yang tetap berada di Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa selama periode 1997-2001 sektor yang memberikan kontribusi besar dalam mengekspor produknya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor listrik, gas dan air bersih. Rata-rata

ekonomi sektor basis yang tetap tersebut telah berpengaruh positif terhadap perubahan kegiatan ekonomi sektor non basis. Terbukti pada tahun 2001 perubahan kegiatan ekonomi non basis di Propinsi Jawa Timur menjadi paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan perubahan ekonomi total di Propinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan sebagai akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi non basis. Besarnya peningkatan kegiatan ekonomi total ini adalah sebesar multipliernya.

kebocoran selama periode 1997-2001 adalah sebesar 1,25 persen, berarti 98,75 persen dari kebocoran pendapatan sektor basis tetap berada di Propinsi Jawa Timur.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini untuk pengembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sektor yang telah diketahui memiliki keunggulan atau yang disebut sebagai sektor basis hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga terus bersaing dengan sektor yang sama di Indonesia pada tahun yang akan datang.
2. Sektor basis hendaknya menjadi pendorong sektor non basis. Karena apabila perubahan atau peningkatan sektor non basis berpengaruh positif terhadap perubahan atau peningkatan sektor non basis maka, bisa dimungkinkan sektor yang semula non basis menjadi sektor basis.
3. Pemerintah Propinsi Jawa Timur harus melakukan kebijakan-kebijakan tertentu agar sektor basis di Propinsi Jawa Timur tidak hanya bertahan menjadi sektor basis dengan persentase yang tetap, tetapi juga harus ada peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga semakin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.
4. Sektor yang mempunyai kebocoran pendapatan tertinggi harus dipertahankan dan ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kebocoran pendapatan semakin besar pula kemampuan ekspornya. Tetapi hal ini tidak boleh mengabaikan pendapatan yang tetap di Propinsi Jawa Timur. Karena pendapatan yang tetap berada di suatu daerah mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

Beberapa hal di atas diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam membangun daerahnya sehingga untuk yang akan datang dapat dicapai hasil pembangunan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini P, Dian, 2003. *Disparitas Pembangunan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Tahun 1986-2000*. Hasil Riset, Non-Publikasi.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Anonim, 2001. *Jawa Timur dalam Angka Tahun 2001*. Surabaya: BPS.
- _____, 2002. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chapin, Timothy, 1999. *Economic Base Theory*. University of Washington DC.
- Dinc Mustafa, 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*, Washington DC.: World Bank Institute,
- Glasson, Jhon, 1990. *Pengantar Perencanaan Regional* (Terjemahan oleh Paul Sitohang), Jakarta: LPFE UI.
- Jhingan, ML, 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalena Leni, 2000. *Analisis Penerapan Model Makro Ekspor Base di Propinsi Bengkulu*. Hasil Riset, Non-Publikasi.
- Richardson, Harry W, 1997. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional* (Terjemahan oleh Paul Sitohang), Jakarta: LPFE UI.
- Richardson, Harry W, 1997. *Regional Economic*. USA: University of Illionis Press
- Ridwan, Mufti dkk, 2002. *Analisis Penentuan Spesialisasi Sektor di Kabupaten Boyolali dalam Menghadapi Implementasi Otonomi*

Daerah: Masa Krisis 1997-1999. Hasil Riset, Non-Publikasi.

Scafer, William, 1999. *Regional Impact Models* (Chapter 2). USA: University of Washington DC.

Soebagio, Daryono, 1995. *Analisis Penerapan Model Ekonomi Regional "Export Base" di Propinsi Bengkulu*. Hasil Riset, Non-Publikasi.

Soepono, Prasetyo, 2001. *Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, Vol.16, No.1, Yogyakarta: FE UGM.

Tambunan, T, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.